

BAB II

Tragedy of the Commons, Trade Based Money Laundering dan Trade Transparency Unit

Pada bab II skripsi ini akan menjelaskan mengenai fenomena kejahatan pencucian uang yang menjadi dasar dari terbentuknya penelitian ini, yaitu *Trade Based Money Laundering* (TBML). TBML akan dijelaskan mulai dari pengertian, potensi bahaya dari kejahatan TBML, modus operandi dan contoh kasus yang menggunakan praktek TBML tersebut. Selanjutnya, bab ini juga akan menjelaskan mengenai kerjasama *Trade Transparency Unit* (TTU) yang menjadi objek penelitian ini. TTU akan dijelaskan sebagai bagian dari rezim anti pencucian uang yang dimiliki Amerika Serikat.

2.1 *Trade Based Money Laundering*

2.1.1 *Gambaran Umum*

Pada tahun 2006, *Financial Action Task Force* (FATF) mengeluarkan laporan mengenai *Trade Based Money Laundering* (TBML). Berdasarkan FATF (2006:3) TBML didefinisikan sebagai proses penyamaran hasil kejahatan dan perpindahan nilai melalui penggunaan transaksi perdagangan untuk melegitimasi asal-usulnya yang ilegal. TBML merupakan satu diantara tiga metode yang umumnya digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang. Praktek pencucian uang memiliki tiga metode utama, yaitu: (1) perpindahan nilai uang melalui sistem finansial; (2) perpindahan uang tunai secara fisik melalui penyelundupan; (3) perpindahan nilai uang dengan pemalsuan dokumen barang dan jasa yang

diperdagangkan (FATF, 2006:1). Penggunaan TBML sebagai teknik untuk melakukan pencucian uang baru mendapatkan perhatian beberapa tahun terakhir ini. Meskipun demikian, praktek TBML sesungguhnya dianggap sudah umum digunakan oleh pelaku kejahatan. Perdagangan dianggap sebagai jalur terlemah dalam usaha anti pencucian uang dan “*a ready made vehicle*” untuk kejahatan pencucian uang (www.economist.com 17/01/2018)¹.

Pada tahun 1968, Garrett Hardin menulis mengenai apa yang dikenal sebagai *Tragedy of the Commons*. Walaupun TBML dan kejahatan pencucian uang pada umumnya tidak dapat secara persis dikatakan sebagai *the commons*, namun dalam mencoba menjelaskan TBML dan potensi bahaya yang dapat ditimbulkannya dapat digunakan beberapa ide atau penggambaran dari *Tragedy of the Commons* tersebut. *Tragedy of the Commons* ala Hardin merupakan sebuah keadaan dimana tiap individu bertindak berdasarkan kepentingannya masing-masing dan berujung pada eksploitasi sumber daya bersama (*the commons*). Dalam tulisannya, kurang lebih Hardin menjelaskan *Tragedy of the Commons* sebagai berikut:

Terdapat sebuah padang rumput yang terbuka untuk umum. Pada keadaan tersebut, sebagai aktor rasional, tiap penggembala akan bertindak untuk memaksimalkan keuntungannya dengan cara menambahkan lebih banyak hewan ke dalam kumpulan ternaknya. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu penggembala namun setiap penggembala yang saling berbagi padang rumput tersebut. Hingga kemudian terjadilah *Tragedy of the Commons*, dimana tiap individu meningkatkan keuntungannya tanpa batas di dunia yang sesungguhnya

¹ Sebagaimana dinyatakan dalam artikelnya, *Uncontained*, *The Economist* menyatakan bahwa penyelidik bea cukai Amerika menemukan bahwa kartel Kolombia menggunakan hasil dari penjualan narkoba untuk membeli boneka mainan di Los Angeles, mengekspornya ke Kolombia, dan mendapatkan uang tunai yang kemudian disimpan ke dalam bank. Tanpa harus menyelundupkan narkoba kedalam boneka, mereka tetap dapat mendapatkan keuntungan (www.economist.com 17/01/2018).

memiliki keterbatasan. Kebebasan dalam *the commons* menimbulkan kehancuran bagi semua (Hardin, 1968:1244).

Dalam *Tragedy of the Commons* yang kemudian umumnya terjadi adalah kelangkaan (*scarcity*) maupun apa yang dikatakan sebagai kegagalan pasar (*market failure*)².

Fenomena TBML tidak dapat dikatakan secara persis sebagai *Tragedy of the Commons* dikarenakan *the commons* yang dimaksudkan dalam tulisan Hardin tersebut lebih merupakan sumber daya alam dibandingkan sesuatu yang lebih abstrak seperti perdagangan maupun pasar. Meskipun demikian, *Tragedy of the Commons* juga menggambarkan mengenai suatu keadaan yang memungkinkan para aktor didalamnya bertindak untuk memaksimalkan kepentingan dan keuntungannya masing-masing, yang disebut sebagai bertindak secara rasional. Kebebasan yang dimiliki *the commons*, nyatanya memberikan pengaruh untuk para aktor tersebut bertindak rasional yang akhirnya menyebabkan kerugian bersama. Fenomena TBML dapat dikatakan sebagai bentuk dari tindakan rasional para aktor yang mengeksploitasi pasar melalui sistem perdagangan dan pada akhirnya dapat menimbulkan potensi kerugian bersama. Hal tersebut merupakan sebuah paradoks dari kebebasan yang coba dijelaskan dalam narasi *Tragedy of the Commons*.

² Secara singkat, *market failure* atau kegagalan pasar merupakan suatu keadaan dimana permintaan (*demand*) tidak sebanding dengan persediaan (*supply*) sehingga menimbulkan ketidakseimbangan (*disequilibrium*). Kegagalan pasar merupakan situasi akibat dorongan perilaku rasional individu yang tidak berujung pada hasil rasional untuk bersama (www.investopedia.com 16/03/2018).

TBML merupakan sebuah bentuk dari pencucian uang, dimana Masciandaro (2007:2) mendefinisikan pencucian uang sebagai usaha untuk mentransformasi likuiditas ilegal, yang merupakan daya beli potensial, menjadi daya beli sesungguhnya yang dapat digunakan, ditabung, dan diinvestasikan. Dengan menerapkan perilaku rasional demi meraih keuntungan sebesar-besarnya, para pelaku TBML kemudian memanfaatkan sistem perdagangan guna mengubah likuiditas ilegal yang dimiliki untuk kemudian dapat menjadi daya beli sesungguhnya. Secara umum, euro atau dollar yang sudah ‘dicuci’ memiliki nilai (*value*) yang lebih besar untuk pelaku kriminal dibandingkan uang ‘kotor’ (Masciandaro, 2007:3). Memanfaatkan sistem perdagangan dengan mencemari pasar, yang dimana pasar pemanfaatannya dilakukan secara bersama oleh siapapun yang melakukan aktivitas perdagangan, sejalan dengan penggambaran *Tragedy of the Commons* dimana para gembala tersebut memanfaatkan padang rumput yang terbuka untuk umum. Namun sekali lagi, fenomena TBML tidak dapat dikatakan persis sebagai *Tragedy of the Commons* karena tidak secara pasti menimbulkan kelangkaan. Meskipun demikian, kerugian bersama yang ditimbulkan akibat kebebasan dalam *the commons*, dapat menggambarkan potensi bahaya dari TBML.

TBML maupun pencucian uang tentunya dapat menimbulkan kerugian bersama. Kerugian bersama yang paling jelas dari TBML maupun pencucian uang adalah kenyataan bahwa pencucian uang dilatarbelakangi oleh kejahatan utama, atau yang disebut sebagai *predicate offence* atau *predicate crime*, sebagai kejahatan yang melatarbelakangi terjadinya pencucian uang. Dimana dengan

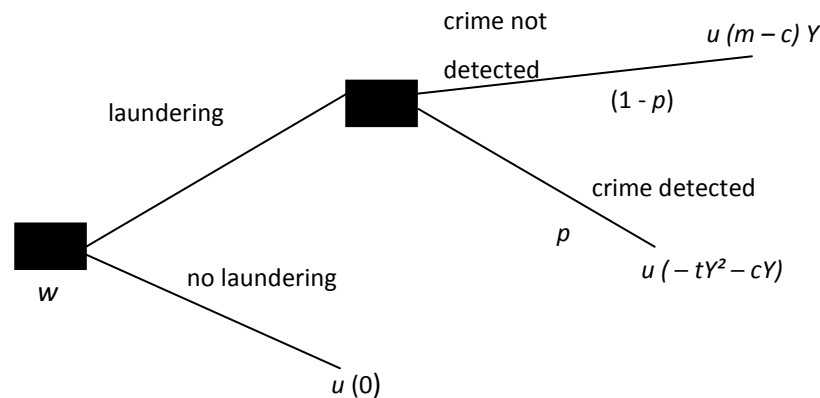
berkembangnya kejahatan-kejahatan tersebut kemudian dapat berpengaruh terhadap segi sosial dan perekonomian suatu negara. *Predicate offence* atau *predicate crime* pada umumnya terdiri dari aktivitas-aktivitas ilegal seperti perdagangan dan penggelapan manusia, perdagangan narkoba, penghindaran pajak dan jenis aktivitas ilegal lainnya. Pencucian uang merupakan proses penting untuk membuat kejahatan sepadan dengan usaha yang dilakukan (McDowell dan Novis, 2001:8). Kejahatan pencucian uang diperlukan pelaku kejahatan untuk membuat aktivitas kejahatannya semakin berkembang. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap meningkatnya anggaran pemerintah untuk penegakan hukum dan pengeluaran jaminan kesehatan, contohnya perawatan terhadap pecandu narkoba, guna menangani konsekuensi dari berkembangnya kejahatan (McDowell dan Novis, 2001:8). Selain itu, bahaya laten yang kemudian ditimbulkan kejahatan pencucian uang adalah anggapan bahwa “*crime does pay*”³.

Bagaimana kemudian kondisi “*crime does pay*” berhasil dicapai oleh pelaku kejahatan, dapat dijelaskan melalui model mikroekonomi terhadap organisasi kriminal. Seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, bahwa kegiatan pencucian uang diperlukan guna mengubah daya beli potensial dari likuiditas ilegal menjadi daya beli sesungguhnya. Masciandaro (2007:9) kemudian merumuskan model mikroekonomi yang berusaha menjelaskan keadaan dimana pencucian uang dapat menguntungkan pelaku kejahatan dengan beberapa variabel pertimbangan yang menjadi faktor penentu apakah pencucian uang akan lebih

³ *Crime does pay* merupakan sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa seseorang maupun kelompok yang melakukan tindakan kriminal mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya.

memberikan keuntungan jika dilakukan atau tidak. Hal tersebut dikarenakan jika pencucian uang tidak dilakukan maka pelaku tidak akan dapat memaksimalkan pendapatan ilegalnya, begitupun jika kejahatan pencucian berhasil terdeteksi maka pelaku akan mendapatkan hukuman berganda, bagi aktivitas ilegalnya dan pencucian uang. Kondisi “*crime does pay*” dapat tercapai ketika pelaku melakukan pencucian uang dan tidak terdeteksi.

Skema 2.1 Alternatif bagi Organisasi Kriminal



Sumber: Masciandaro (2007:9)

Pada skema diatas, dapat dijelaskan bahwa W merupakan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas ilegal (daya beli potensial). Ketika W tidak “dicuci” maka *expected utility* (u) yang dimiliki ada nol (0)⁴. Kemudian ketika dilakukan pencucian uang, kemungkinan terdeteksi aktivitas kriminalnya dinyatakan dengan (p). *Expected utility* yang dimiliki terhadap jumlah yang ingin “dicuci” (Y) ketika pencucian uang terdeteksi adalah hukuman (tY^2) dan biaya (cY) berada pada nilai

⁴ *Expected utility* dinyatakan nol (0) dikarenakan uang ilegal yang tidak dilakukan pencucian uang memiliki keuntungan yang tidak dapat ditentukan atau tidak terdefiniskan.

negatif (*negative expected value*). Jika pencucian uang tidak terdeteksi ($1-p$), maka *expected utility* berada pada nilai positif (*positive expected value*) dengan keuntungan (m) tetap dikurangi dengan biaya untuk melakukan pencucian uang tersebut ($-c$).

Dalam segi ekonomi, kerugian yang dapat ditimbulkan dari pencucian uang pada umumnya dapat dilihat dari segi mikroekonomi dan makroekonomi. Kejahatan pencucian uang tidak hanya permasalahan pasar-pasar finansial besar namun juga terutama berbahaya terhadap pasar yang masih berkembang (*emerging market*) dimana pencucian uang dapat berbahaya terhadap sektor privat (McDowell dan Novis, 2001:7). Pencucian uang dianggap dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan modalnya dengan legal. *Front company*⁵ yang dibentuk guna melakukan pencucian uang dianggap memiliki keuntungan kompetitif yang lebih besar dibandingkan perusahaan biasa. Hal itu dikarenakan modal yang dimiliki lebih besar, dari hasil aktivitas ilegal, sehingga dapat memberikan harga yang relatif jauh lebih murah dibandingkan kompetitor lainnya (McDowell dan Novis, 2001:7). Kemudian dari segi makroekonomi, pencucian uang dapat menyebabkan semakin berkembangnya *underground economy* dan *shadow economy*⁶. Hal tersebut sejalan dengan efek dari segi sosial yang ditimbulkan pencucian uang terkait semakin berkembangnya organisasi kejahatan.

⁵ *Front company* adalah anak perusahaan yang digunakan untuk melindungi perusahaan dari kewajiban atau pengawasan, dan dapat digunakan untuk menyembunyikan aktivitas ilegal (www.businessdictionary.com 19/03/2018).

⁶ *Underground economy* melibatkan transaksi-transaksi ilegal yang dilakukan sedangkan *shadow economy* melibatkan aktivitas yang sesungguhnya legal namun tanpa membayarkan pajak (Hendriyetta dan Grewal, 2017:66).

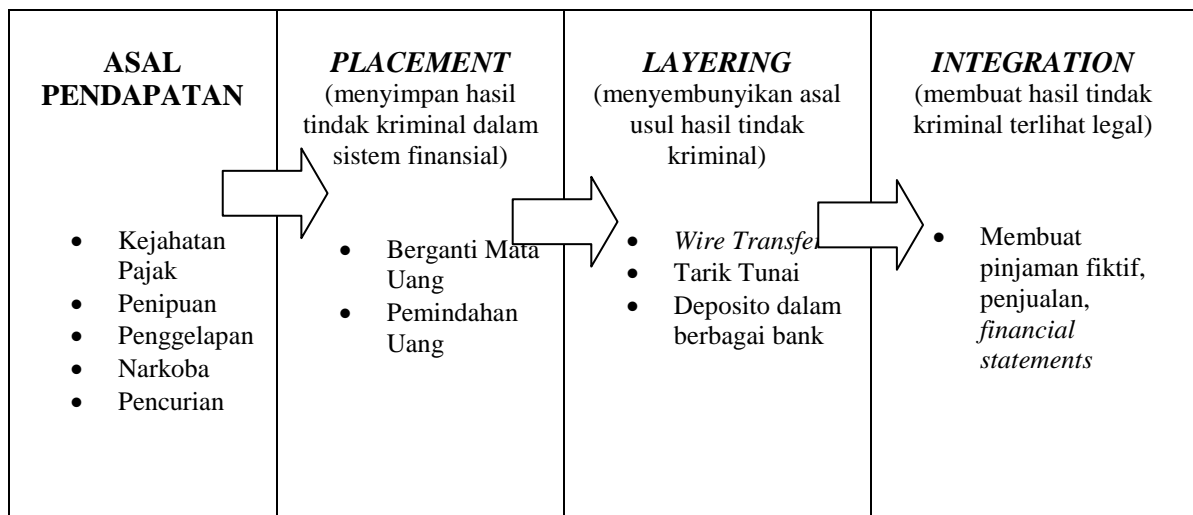
Dalam tulisannya, Hendriyetty dan Grewal (2017) menyatakan bahwa pencucian uang dapat menyebabkan semakin berkembangnya *shadow* dan *underground economy*, arus modal ilegal, dan dapat mempengaruhi pendapatan pajak. Ketika *shadow* dan *underground economy* semakin berkembang, hal tersebut dapat mendistorsi ekonomi formal⁷ (Hendriyetty dan Grewal, 2017:67). Terkait arus modal ilegal, pelaku pencucian uang memindahkan uang hasil tindak kriminal dengan melakukan transaksi internasional. Arus modal ilegal yang keluar dari suatu yurisdiksi dapat membantu pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut (Hendriyetty dan Grewal, 2017:68). Serupa dengan berkembangnya *shadow* dan *underground economy*, arus modal ilegal dapat mendistorsi ekonomi formal dan juga kemudian berakibat pada pendapatan pajak suatu negara. Pada dasarnya potensi bahaya pencucian uang kemudian tidak hanya berdampak terhadap sektor ekonomi namun juga sosial dan dapat terjadi dalam skala nasional maupun internasional, mengingat praktek pencucian uang banyak melalui transaksi internasional. Sehingga dapat dikatakan kemudian potensi bahaya yang ditimbulkan pencucian uang tersebut dapat memberikan kerugian bersama sebagaimana dalam *Tragedy of the Commons*.

TBML pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan kejahatan pencucian uang pada umumnya. Dalam proses pencucian uang, umumnya terdapat tiga

⁷ Hal tersebut dikarenakan baik *underground* maupun *shadow economy* melibatkan aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar secara formal sehingga sulit dikontrol oleh pemerintah. Maka dari itu berakibat menjadi lahan bagi para pelaku kriminal untuk melakukan tindak pencucian uang bagi hasil kejahatan mereka. Semakin besar interaksi antara legal dan ilegal, formal dan informal ekonomi maka akan semakin besar tantangan dalam mengidentifikasi asal usul dana tersebut (Hendriyetty dan Grewal, 2017:67). Ekonomi formal pun kemudian dapat terdistorsi akibat aktivitas ekonomi informal. Dapat dikatakan pula semakin berkembang ekonomi informal maka potensi terjadinya pencucian uang dapat semakin berkembang dan begitu juga sebaliknya.

tahapan yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. *Placement* merupakan tahapan dimana uang hasil transaksi ilegal ditempatkan dalam beberapa institusi finansial, seperti bank, dan dalam bentuk beberapa instrument finansial, seperti deposito (Ejanthkar dan Mohanty, 2011:4). Setelah dilakukan *placement*, kemudian tahapan selanjutnya adalah *layering*. *Layering* merupakan tahapan dimana uang hasil transaksi ilegal diinvestasikan ke dalam ekonomi formal dengan lebih kompleks. Pelaku pencucian uang membuat sumber uang sulit terlacak melalui jual beli saham, komoditas, dan properti (Ejanthkar dan Mohanty, 2011:4). Kemudian setelah berhasil dilakukan proses *layering*, tahapan selanjutnya adalah *integration*. *Integration* merupakan tahapan dimana pelaku kemudian dapat menikmati hasil uang ilegalnya yang telah “terlihat” legal dalam ekonomi formal.

Skema 2.2 Tahapan dalam Pencucian Uang



Sumber: Papanicolaou (2016)

Sebagai salah satu cara dari pencucian uang, TBML sendiri harus melalui ketiga tahapan tersebut agar dapat dikatakan berhasil. Secara khusus kemudian terdapat beberapa cara dalam melakukan TBML.

Berdasarkan FATF, teknik dasar yang digunakan untuk TBML terbagi menjadi empat macam. Pertama, *overinvoice* dan *underinvoice* barang dan jasa. Elemen kunci dari teknik ini adalah misrepresentasi harga barang atau jasa untuk memindahkan nilai lebih antara pengimpor dan eksportir (FATF, 2006:4). Pada teknik ini, umumnya baik importir dan eksportir sudah setuju untuk berkolusi.

Skema 2.3 *Overinvoice* dan *Underinvoice*



Sumber: FATF (2006)

Dalam skema tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan A mengirimkan barang seharga \$2 per satuannya, namun perusahaan B hanya membayar barang tersebut dengan harga \$1 per satuannya. Maka dalam *invoice* yang dibayarkan perusahaan B tersebut dinyatakan nominal sebesar \$1 juta. Dapat dikatakan kemudian telah terjadi *underinvoicing* yang dilakukan perusahaan B selaku

importir. Selanjutnya yang terjadi adalah perusahaan B menjual barang tersebut di pasaran dengan harga \$2 per satuannya dan menyimpan kelebihan \$1 juta tersebut ke dalam rekening guna dicairkan sesuai dengan instruksi perusahaan A. Hal yang sebaliknya dapat juga terjadi antara dua perusahaan, misalkan perusahaan C dan perusahaan D. Perusahaan C (sebagai eksportir) mengirimkan barang sejumlah 1 juta barang dengan harga satuan \$2, namun perusahaan D (sebagai importir) mencantumkan harga pada *invoice* adalah sebesar \$3 per satuannya. Disini kemudian telah terjadi *overinvoicing* yang dilakukan perusahaan D selaku importir. Selanjutnya perusahaan C menyimpan kelebihan \$1 juta ke rekening untuk dicairkan sesuai instruksi perusahaan D.

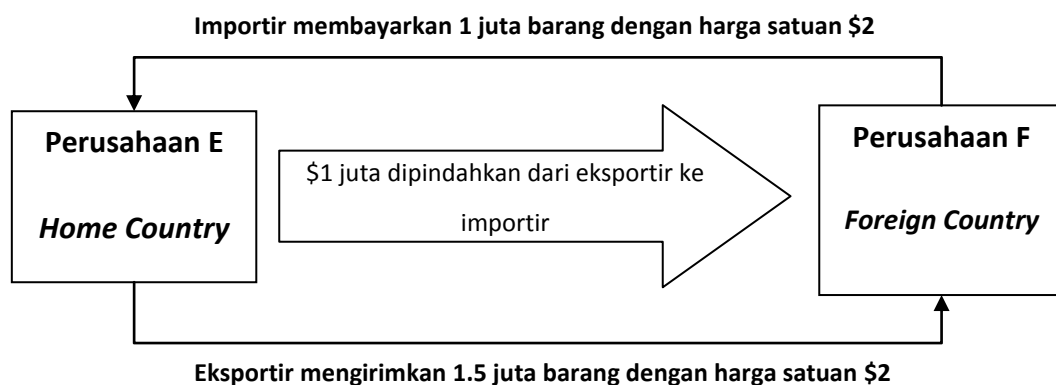
Kedua, *invoice* berganda dari barang dan jasa. Dengan membuat *invoice* berganda untuk satu transaksi yang sama, pelaku kejahatan dapat memberikan justifikasi untuk *multiple payments* terhadap barang maupun jasa (FATF, 2006:5)⁸. Dalam metode ini meskipun dapat melibatkan proses *mispricing* namun hal tersebut tidak selalu diperlukan. Ketiga, *overshipment* dan *undershipment* barang dan jasa. Selain memanipulasi harga, pelaku kejahatan juga dapat

⁸ Pada tahun 2016, sebuah perusahaan garmen dari Tiongkok bernama Motives membayar denda kepada pemerintah Amerika Serikat sebesar lebih dari US\$13juta akibat terlibat dalam skema *double invoicing* guna menipu bea cukai Amerika Serikat (www.lexology.com 26/05/2018). Motives menggunakan dua set faktur: satu yang menyatakan *undervalued* dan satu lainnya yang menyatakan nilai yang sesungguhnya. Untuk penghitungan biaya bea cukai digunakan faktur yang menyatakan *undervalued* sehingga telah dilakukan penipuan terhadap pihak bea cukai Amerika Serikat.

memanipulasi kuantitas dari barang yang diperdagangkan bahkan dalam kasus yang ekstrim dapat terjadi *phantom shipment*⁹(FATF, 2006:6).

Dalam skema berikut kemudian dapat dilihat bahwa perusahaan E (sebagai eksportir) menjual sejumlah 1 juta barang kepada perusahaan F (selaku importir) dengan harga satuan \$2, namun ternyata jumlah barang yang dikirimkan adalah 1.5 juta barang. Perusahaan F membayarkan kepada perusahaan E sejumlah \$2 juta. Maka telah terjadi *overshipment* dalam transaksi tersebut.

Skema 2.4 *Overshipment dan Undershipment*



Sumber: FATF (2006)

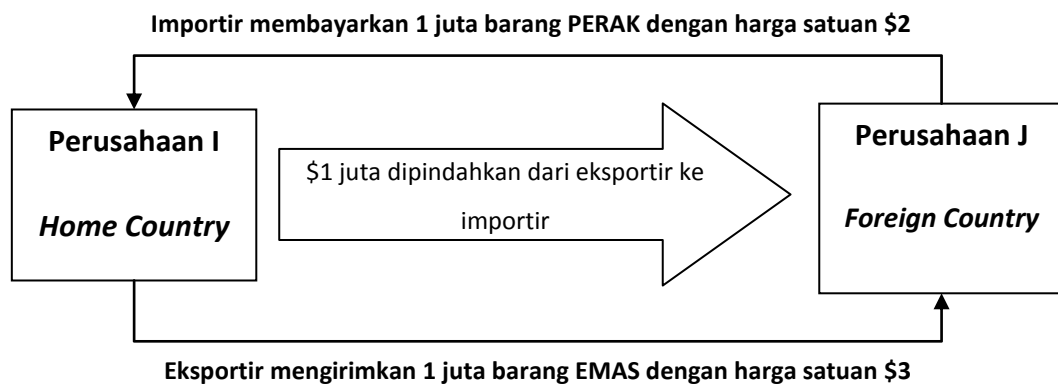
Selanjutnya perusahaan F menjual barang tersebut di pasaran dan mendapatkan \$3 juta, kelebihan \$1 jutanya kemudian disimpan dalam rekening dan dicairkan sesuai instruksi perusahaan E. Hal sebaliknya dapat juga terjadi misalkan dengan perusahaan G dan perusahaan H. Perusahaan G (selaku eksportir) menjual barang sejumlah 1 juta barang kepada perusahaan H (selaku

⁹ Dalam teknik ini, *phantom shipment* terjadi ketika tidak ada barang yang sebenarnya dikirimkan. Dokumen yang diproses hanya menjadi justifikasi untuk pembayaran yang dilakukan (Cassara, 2016:16).

importir) dengan harga satuan \$2, namun hanya mengirimkan barang sejumlah 500.000 barang. Perusahaan H kemudian membayarkan sejumlah \$2 juta kepada perusahaan G. Selanjutnya perusahaan G menyimpan kelebihan uang \$1 juta ke rekening dan dicairkan sesuai instruksi perusahaan H. Maka telah terjadi *undershipment* dalam transaksi tersebut.

Keempat, deskripsi palsu dari barang dan jasa. Pelaku kejahatan pencucian uang juga dapat memanipulasi kualitas atau tipe dari barang dan jasa, contohnya dengan mengirimkan barang yang sesungguhnya relatif murah namun dinyatakan mahal dalam *invoice* (FATF, 2006:6).

Skema 2.5 Deskripsi Palsu Barang



Sumber: FATF (2006)

Dalam skema tersebut kemudian dapat dilihat bahwa perusahaan I (selaku eksportir) mengirimkan sejumlah 1 juta barang emas dengan harga satuan \$3 kepada perusahaan J, namun dalam *invoice* kepada perusahaan J ditulis sejumlah 1 juta barang perak dengan harga satuan \$2. Perusahaan J kemudian membayar

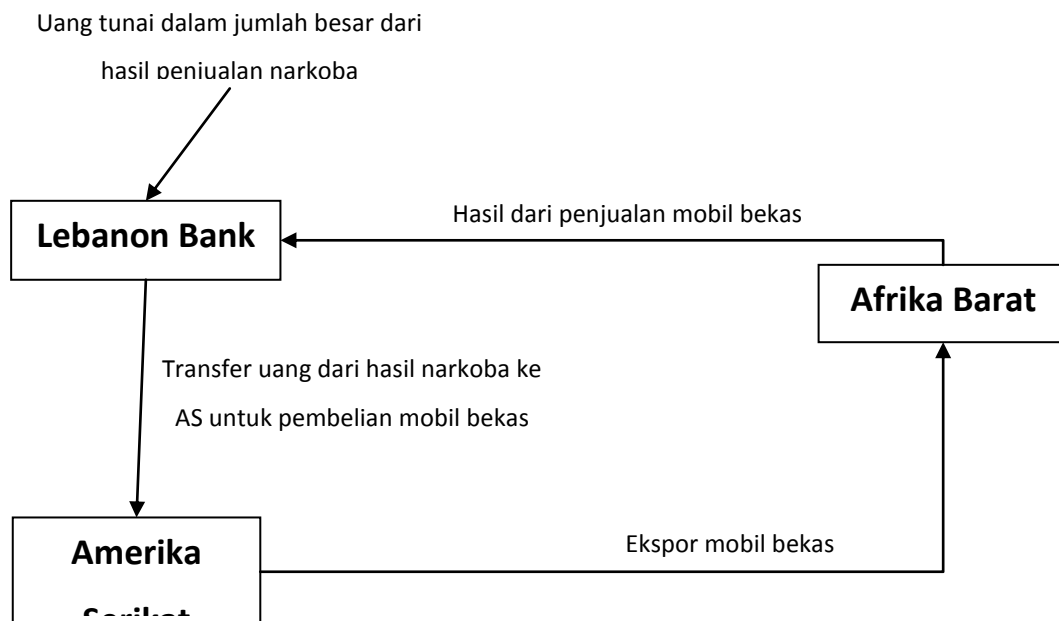
sejumlah \$2 juta sesuai dengan *invoice*, maka telah terjadi deskripsi palsu terhadap barang yang sesungguhnya dikirimkan. Selanjutnya seperti pada metode sebelumnya, perusahaan J kemudian menjual barang tersebut di pasaran dan menyimpan kelebihan keuntungannya di rekening dan dicairkan sesuai instruksi perusahaan I dan hal sebaliknya juga dapat terjadi. Pada dasarnya, metode-metode yang digunakan dalam TBML tersebut berusaha untuk melakukan *transfer value* dari barang yang diperdagangkan dengan cara memanipulasi baik harga, kuantitas maupun kualitas barang. Selisih maupun keuntungan penjualan dari transaksi tersebut kemudian dapat dipergunakan secara aman dalam sektor ekonomi formal.

2.1.2 Contoh Kasus

Untuk memahami TBML lebih lanjut, berikut merupakan contoh kasus pencucian uang yang menggunakan praktek TBML. Contoh kasus yang akan diberikan merupakan kasus yang terjadi pada institusi finansial Lebanon, *Lebanese Canadian Bank (LCB)*. Pada kasus tersebut pelaku kejahatan memanfaatkan bank tersebut untuk menyimpan uang hasil kejahatannya dan menjalankan skema pencucian uang, termasuk didalamnya menggunakan metode TBML, untuk “mencuci” uang hasil kejahatannya. Dengan menggunakan mobil bekas dan barang konsumen (*consumer goods*) sebagai komoditas yang diperjualbelikan dalam perdagangan internasional. Kasus ini diduga memiliki keterlibatan dengan aktivitas kelompok teroris Hezbollah. Pengadilan Amerika Serikat menuntut LCB pada Desember 2011 terkait skema besar yang melibatkan Hezbollah, yang dimana masuk dalam daftar organisasi teroris Amerika Serikat (www.reuters.com 13/04/2018).

Pada sekitar tahun 2007-2011, setidaknya \$329 juta ditransfer dari *Lebanese Canadian Bank, Hassan Ayash Exchange Company, Ellissa Exchange Company*, dan institusi finansial Lebanon lainnya ke Amerika Serikat untuk pembelian dan pengiriman mobil-mobil bekas (Cassara, 2016:24). Dalam kasus tersebut tidak hanya melibatkan perdagangan internasional mobil bekas antara Amerika Serikat dengan wilayah Afrika Barat namun juga perdagangan barang konsumen (*consumer goods*) dari wilayah Asia menuju Amerika Latin dengan kedua skema tersebut menggunakan uang yang disimpan pada bank LCB tersebut.

Skema 2.6 TBML melalui Mobil Bekas

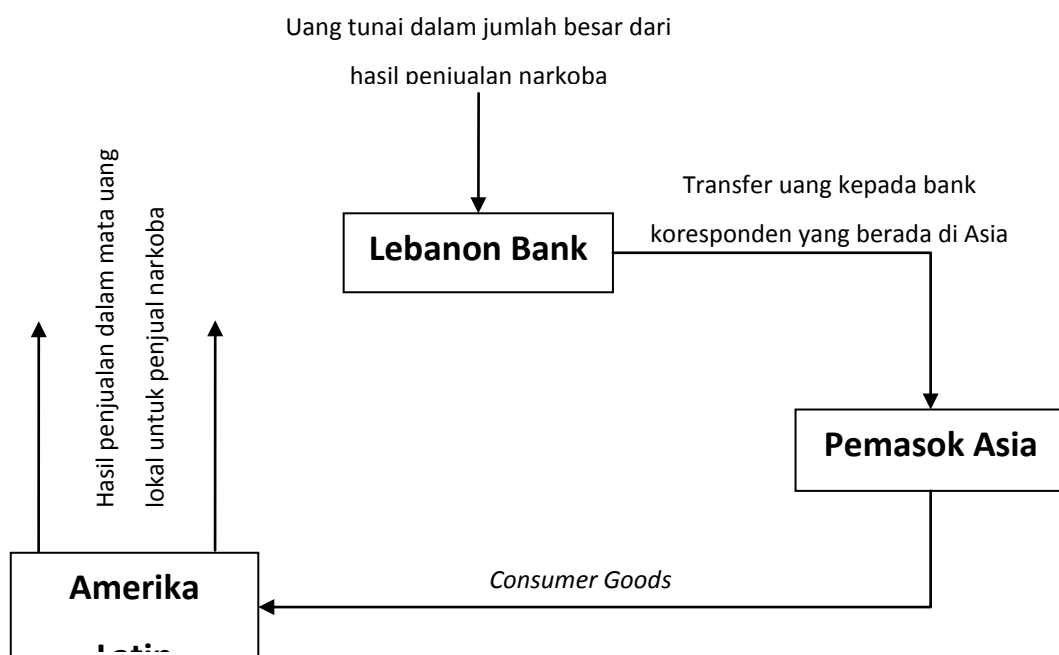


Sumber: Cassara (2016:24)

Dari skema diatas dapat dilihat modus operandi dari kasus *Lebanese Canadian Bank* tersebut. Dimulai dari uang hasil kejahatan yang dilakukan (*predicate crime*) disimpan pada bank di Lebanon tersebut. *Lebanese Canadian Bank* (LCB)

berbasis di Beirut, Lebanon dan memiliki jaringan sebanyak 35 cabang di Lebanon dan kantor representatif di Montreal, Canada (www.treasury.gov 09/04/2018). Dari rekening bank tersebut kemudian, uang hasil kejahatan ditransfer ke Amerika Serikat untuk pembelian mobil-mobil bekas, guna menjalankan bisnis jual beli mobil bekas. Mobil-mobil bekas tersebut kemudian dijual ke Afrika dan hasil penjualannya tersebut dikirimkan kembali ke rekening bank LCB tersebut. Pertukaran uang dalam kasus tersebut melibatkan berbagai macam teknik TBML, termasuk didalamnya *misinvoicing* dari mobil bekas (Cassara, 2016:24).

Skema 2.7 TBML melalui *Consumer Goods*



Sumber: Cassara (2016:24)

Dari skema diatas dapat dilihat bahwa modus operandi yang dilakukan dalam pencucian uang melalui barang konsumen (*consumer goods*) ini tidak jauh

berbeda dengan skema mobil bekas sebelumnya. Uang hasil kejahatan yang disimpan pada LCB ditransferkan kepada bank koresponden di Asia sebagai dana untuk pembelian barang konsumen. Setelah itu barang konsumen tersebut diekspor ke Amerika Latin dan hasil keuntungannya dikonversikan sesuai mata uang lokal yang kemudian dapat diterima oleh sindikat narkoba Amerika Latin selaku pelaku kejahatan. Metode TBML kemudian digunakan dalam perdagangan internasional barang konsumen tersebut.

2.2 Trade Transparency Unit

Dalam upaya menanggulangi kejahatan pencucian uang, dunia internasional sesungguhnya telah melakukan beberapa usaha. Meskipun pembentukan rezim anti pencucian yang kuat pada dasarnya memiliki tantangan dikarenakan perbedaan institusi, perspektif, dan prioritas diantara negara-negara (Reuter dan Truman, 2004:45). Dalam perkembangannya kemudian, rezim anti pencucian uang telah dibangun terutama melalui pembentukan organisasi seperti FATF (*Financial Action Task Force*) dan *Egmont Group*. FATF dibentuk pada tahun 1989 dengan tujuan untuk membentuk standar rekomendasi kebijakan dan mempromosikan hal-hal terkait proteksi sistem finansial global terhadap pencucian uang, pendanaan terorisme dan pengembangan senjata penghancur masal (www.fatf-gafi.org 14/10/2017). Sedangkan *Egmont Group* yang dibentuk tahun 1995 merupakan wadah terpercaya untuk bertukar informasi terkait usaha pemberantasan pencucian uang, sejalan dengan usahanya untuk meningkatkan komunikasi antar FIU.

Sebagai salah satu negara yang memiliki *bargaining power* kuat di kalangan internasional, Amerika Serikat juga memiliki rezim anti pencucian uang yang cukup signifikan. Pencucian uang tidak dikriminalisasi di Amerika Serikat hingga dikeluarkannya *Money Laundering Control Act* (MLCA) tahun 1986 (Reuter dan Truman, 2004:65). Meskipun demikian, kejahatan pencucian uang telah terjadi sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut. Sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, *predicate crimes* dari kejahatan pencucian uang di Amerika Serikat semakin beragam. Salah satu peristiwa yang penting dalam penguatan rezim anti pencucian uang di Amerika Serikat adalah peristiwa 9/11 yang dimana paska peristiwa tersebut dikeluarkannya USA PATRIOT Act tahun 2001¹⁰. Kemudian perkembangan rezim anti pencucian uang di Amerika Serikat tidak berhenti disitu, dengan dikeluarkannya laporan FATF pada 2006 mengenai TBML menandakan semakin meningkatnya kesadaran terkait TBML, Amerika Serikat telah terlebih dahulu membentuk *Trade Transparency Unit* (TTU).

U.S. Department of Homeland Security (DHS), *Immigration and Customs Enforcement's Homeland Security Investigations* (ICE/HSI) membentuk TTU untuk pertama kalinya di Washington, DC pada tahun 2004 (Miller, Rosen dan James Jackson, 2016:13). TTU kemudian menjadi alat baru dalam penguatan rezim anti pencucian uang yang dimiliki Amerika Serikat dan sekaligus memenuhi kepentingan nasional Amerika Serikat untuk memerangi kejahatan

¹⁰ *Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism* (USA PATRIOT) Act 2001 merupakan kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Bush setelah terjadinya peristiwa 9/11. Dikatakan penting karena dalam kebijakan tersebut juga mengatur terkait penanganan kejahatan pencucian uang dan kaitannya terhadap pendanaan aktivitas terorisme (<https://corporate.findlaw.com> 03/05/2018). Sehingga dengan hal tersebut, *predicate crimes* pencucian uang di Amerika Serikat lingkungannya meluas hingga terorisme.

pencucian uang dalam skala global¹¹. Pada dasarnya TTU digunakan sebagai alat untuk mendeteksi apakah suatu transaksi perdagangan internasional terdapat potensi terjadinya TBML. Dalam TTU kemudian digunakan sistem yang dinamakan *Data Analysis and Research for Trade Transparency System* (DARTT). Dalam sistem tersebut terdapat data terkait perdagangan domestik dan internasional untuk kemudian dapat dilihat melalui sistem tersebut data transaksi perdagangan dari kedua sisi, sehingga tercipta transparansi perdagangan (Cassara, 2016:161).

Tabel 2.1 Daftar Negara yang Menjalinkan Kerjasama TTU dengan Amerika Serikat per Juni 2016

Negara dengan TTU	Tahun Kerjasama
Kolombia	2005
Argentina	2006
Paraguay	2007
Meksiko	2008
Panama	2010
Ekuador	2011
Australia	2012
Guatemala	2012
Republik Dominika	2013
Filipina	2013
Peru	2016
Uruguay	2016

Sumber: (Miller,Rosen dan James Jackson, 2016:13).

Pada tahun 2007, pemerintah Amerika Serikat menjadikan transparansi perdagangan dan pengembangan TTU sebagai bagian dari strategi nasional anti

¹¹ Berdasarkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, kerjasama-kerjasama TTU tersebut merupakan dasar bagi terbentuknya jaringan kerjasama TTU yang lebih mengglobal, agar serupa dengan *Egmont Group* (Miller,Rosen dan James Jackson, 2016:14).

pencucian uangnya sebagai bentuk komitmen dalam menanggulangi TBML (Cassara, 2016:161).

Pada permulaan bab ini, dijelaskan mengenai analogi *Tragedy of the Commons* terhadap fenomena TBML. Seperti dijelaskan sebelumnya, meskipun TBML tidak dapat secara persis dikatakan sebagai *Tragedy of the Commons* namun beberapa argumen terkait hal tersebut dapat digunakan dalam membantu menjelaskan hal-hal terkait fenomena TBML. Selain daripada yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam *Tragedy of the Commons*, terdapat argumen penting lainnya yaitu terkait solusi dan kebebasan.

Hardin (1968) menyatakan bahwa dalam *Tragedy of the Commons* tidak terdapat solusi yang bersifat teknis¹² namun demikian suatu aturan yang bersifat koersi, meskipun koersi yang bersifat tersirat, tetap diperlukan dalam upaya mengatur *the commons*. Kemudian dalam *Tragedy of the Commons*, sebatas aturan tidaklah cukup karena pada dasarnya tidak terdapat solusi yang bersifat teknis sehingga dibutuhkan kesadaran terhadap makna kebebasan dan kebutuhan. Dalam mencoba menjelaskan hal tersebut, Hardin menggunakan istilah dari Hegel yaitu, "*Freedom is the recognition of necessity*¹³." Dimana dapat dijelaskan secara

¹² Dalam essaynya, Hardin menjelaskan yang dimaksud dengan solusi yang bersifat teknis adalah solusi yang hanya membutuhkan perubahan dari segi teknis ilmu pengetahuan saja, tanpa atau dengan sedikit perubahan pada nilai moralitas manusia itu sendiri (Hardin, 1968:1243).

¹³ Dalam usaha memahami kalimat tersebut, dapat mengacu pada ungkapan bahwa individu menjadi bebas hanya jika menjadi warga negara yang taat pada hukum. Dalam filosofi Marxist, kebutuhan (*necessity*) dapat dikatakan sebagai segala fenomena alam dan masyarakat (*society*) yang diatur oleh hukum dan terlepas dari kehendak (*will*) atau keinginan (*desire*) manusia (www.revolutionarydemocracy.org 27/05/2018). Kemudian, adalah sebuah keharusan untuk mematuhi hal tersebut, namun pada saat bersamaan manusia menginginkan kebebasan dari kewajiban tersebut. Tetapi kebebasan hanya dapat dicapai dengan tidak menolak keberadaan kewajiban tersebut, namun dengan menyadari dan mematuhi peraturan atau hukum tersebut (www.revolutionarydemocracy.org 27/05/2018).

singkat, permasalahan dalam *Tragedy of the Commons* sesungguhnya tidak memiliki solusi yang bersifat teknis namun bergantung hanya pada hati nurani tiap individu juga bukan merupakan cara yang tepat. Maka tetap dibutuhkan aturan yang bersifat koersi dan kesadaran dari masyarakat dimana agar dapat selalu memenuhi kebutuhan maka terdapat kebebasan yang harus dibatasi¹⁴ agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai *Tragedy of the Commons*.

Dalam fenomena TBML, kerjasama TTU dibutuhkan sebagai bentuk dari meningkatkan kesadaran akan kebutuhan (*recognition of necessity*) dan membentuk aturan koersi bersama (*mutual coercion*). Dimana kedua hal tersebut diperlukan dalam menjaga *the commons*, atau dalam hal ini pasar, agar tragedi yang terjadi terhadap *the commons* dapat terhindarkan atau diminimalisir.

¹⁴ Contohnya dalam essay Hardin (1968) yaitu kebebasan untuk berkembang biak atau memiliki keturunan harus dibatasi agar manusia dan komunitasnya dapat terus memenuhi kebutuhannya dalam jangka panjang. Dikarenakan dalam essaynya Hardin membahas mengenai permasalahan *overpopulation* atau ledakan penduduk.